

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- BPHN, 2007, *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Jakarta.
- Dewi, Santia dan Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori & Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hasbullah, Afif, 2005, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harris, Freddy dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Djaja, Jakarta.
- HS, Salim & Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Ismail, Nurhasan, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi-Politik*, HuMa, Jakarta.
- Latief, Abdul, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Hasbi Ali, 2011, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1994, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muchsin dan Fadillah Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Universitas Sunan Giri Surabaya, Surabaya.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2009, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rosadi, Otong dan Andi Desmon, 2013, *Studi Politik Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Sumitro, Hanitijo Ronny, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan*, Erlangga, Jakarta.
- Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Pajajaran.
- Wahjono, Padmo, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun  
2007 tentang Formasi Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.05.AH.02.11  
Tahun 2009 tentang Formasi Jabatan Notaris;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.AH.02.10  
Tahun 2011 tentang Formasi Jabatan Notaris;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang  
Formasi Jabatan Notaris;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2015 tentang  
Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor  
26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2016 tentang  
Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

### **C. Tulisan Ilmiah**

Prabowo, Tommy, 2011, “Formasi Jabatan Notaris dan Kaitannya dengan  
Pelanggaran Kode Etik Notaris (Studi Kasus di Kabupaten Tangerang)”,  
*Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Jakarta.

Ramadhani, Putri Wulan, 2016, “Sistem Penentuan Formasi Jabatan Notaris di  
Wilayah Kabupaten Sleman”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universits  
Gadjah Mada, Yogyakarta.

### **D. Seminar**

Workshop tentang *Peranan Kementerian Hukum dan HAM dalam Pengangkatan  
dan Pengawasan Notaris* Kerjasama dengan Program Studi Kenotariatan  
Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, Tgl 12 Juni 2017.

### **E. Internet**

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Online, *Pendaftaran Notaris*,  
<https://ahu.go.id/notariatv3/PendaftaranUser/formasiNotaris>, diakses  
tanggal 5 Juni 2018.

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a6b21f72f5a8/kemenkumham-  
pastikan-mulai-2018-penerimaan-mkn-harus-dihentikan](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a6b21f72f5a8/kemenkumham-pastikan-mulai-2018-penerimaan-mkn-harus-dihentikan), terakhir diakses  
Minggu, 20 Januari 2019 Pukul 12.50 WIB.

<http://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/487-layanan-ditjen-ahu-online>,  
terakhir diakses Pukul 14.10 WIB, 14 Januari 2019.